



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEMAKIR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 943658

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.525.900.000**

1. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 162.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/167 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 710.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 614.000.000
4. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 609.000.000
5. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **168.150.000**

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 137.750.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.550.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.150.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.840.674
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.723.890.674
III. HUTANG	Rp.	166.851.869
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.557.038.805

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.